

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Bastian (2009) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kinerja manajerial diperlukan untuk menilai prestasi seorang manajer dan organisasi yang dipimpinnya. Maka dari itu, agar pemerintah yang baik menjadi kenyataan dan dapat terwujud, perlu peningkatan dalam kualitas pelaksanaan kinerja manajerial, instansi pemerintah membuat penetapan kinerja manajerial secara berjenjang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu capaian yang baik, melalui penetapan target kinerja manajerial, serta indikator kinerja manajerial yang menggambarkan pencapaiannya baik berupa keberhasilan maupun manfaat.

Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Sedangkan Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Sedarmayanti, 2004).

Kinerja manajerial merupakan salah faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sistem pengendalian organisasi pada pemerintahan juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik. Sesuai mandat PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal yang dikeluarkan COSO terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pelaksanaan

sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan rewiuw pada seluruh tahapan pembangunan.

Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Soeseno, dalam Ramandei 2009). Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rosdiana : 2010).

Sedangkan akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam

peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Fenomena yang terjadi yaitu mengenai sisa lebih penggunaan anggaran APBD Kabupaten Bandung tahun 2014 mencapai Rp 600 miliar atau setengah triliun rupiah lebih dari total APBD sebanyak Rp 3,7 triliun. Nilai anggaran daerah yang tidak terserap tersebut merupakan yang terbesar setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Besarnya silpa tahun lalu tersebut menuai kritik dari kalangan DPRD Kabupaten Bandung. Soalnya, silpa menunjukkan indikasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang tidak maksimal.

Erwin Gunawan, anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun 2014 menuturkan, silpa tersebut berasal dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas Kabupaten Bandung, di antaranya Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Untuk belanja tidak langsung, lanjut Erwin, Silpa di antaranya berasal dari berbagai program kerja SKPD. Dinas Pendidikan misalnya, ada anggaran beasiswa untuk 3.000 siswa tidak mampu sebanyak Rp 4 miliar yang tidak terserap. Sejumlah dana pembangunan dan perbaikan ruang kelas baru pun banyak yang tidak terealisasi.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, menurut penelitian Astini (2014) Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial pemerintah daerah. Menurut penelitian Solina (2014) Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), Akuntabilitas Publik juga berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Penelitian Ramandei (2009) tentang Pengaruh Karakteristik Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah studi empiris pada SKPD kota Jaya Pura yang hasil penelitiannya bahwa karakteristik sasaran anggaran (Partisipasi Anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial, sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD ”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Bandung.

2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung secara parsial.
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung baik secara parsial maupun stimultan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung secara parsial
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung baik secara parsial
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Bandung baik secara parsial maupun stimultan

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap pihak terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

a. Penulis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan menambah wawasan, serta pengalaman terutama terkait dengan Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan hubungannya dengan Kinerja Manajerial

b. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi SKPD Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam menerapkan kebijakannya sehingga kinerja organisasi publik tersebut menjadi lebih baik.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi terhadap ilmu akuntansi terutama dalam bidang akuntansi sektor publik. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber dan acuan untuk penelitian yang akan datang.